



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/172/BUP-PASBAR/2023
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

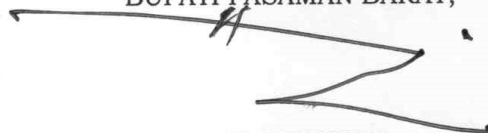
Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan tahun 2023 dan pedoman dalam pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan pembagian rincian pelaksanaan pengawasan seperti keterpaduan jadwal, pembagian pelaksanaan program antar Inspektur Pembantu, serta pembagian wilayah kerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang tidak tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini, diatur oleh Inspektur Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan pengawasan tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal Februari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Gubernur Sumatera Barat melalui Inspektur Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 100.3.3.2/12-BUP-PASBAR/2023
 TANGGAL : 13 Februari 2023
 TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		HP				JUMLAH LHP	TOTAL ANGGARAN	PELAKSANA	KETEBANGAN				
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT					AT	JUMLAH		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Kinerja	Audit Kinerja Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Minggu II Feb 2023	Minggu II Mar 2023	5	15	20	40	100	180	11.700.000	13.950.000	25.650.000	1	Irban I	Risiko tinggi
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Audit Kinerja	Audit Kinerja 3E dan Kepatuhan	Dinas PU	Minggu II Feb 2023	Minggu II Mar 2023	5	15	20	20	120	180	11.700.000	13.950.000	25.650.000	1	Irban IV	Risiko tinggi/ Permitaan Stake Holder
3	Program Penanggulangan Bencana	Audit Ketaatan	Sesuai program terpilih	SPBD	Ming I Mar 23	Minggu III Mar 2023	4	12	12	12	24	64	4.160.000	4.980.000	9.120.000	1	Irban IV	Risiko tinggi
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Kinerja	Audit Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan/RSD/Puskesmas	Minggu II Feb 2023	Minggu II Mar 2023	5	20	20	40	180	285	15.900.000	28.500.000	42.400.000	1	Irban II dan Irban III	Risiko tinggi
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Audit Kinerja	Audit Kinerja Program	Perikanan Budidaya	Minggu II Feb 2023	Minggu IV Feb 2023	4	12	12	12	24	64	4.160.000	4.950.000	9.120.000	1	Irban II	Risiko tinggi
6	Program Pengelolaan Persampahan	Audit Ketaatan	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Ming I Mar 23	Minggu III Mar 2023	2	10	10	10	50	82	5.330.000	6.355.000	11.685.000	1	Irban II	Risiko tinggi
7	Program Pengembangan Perumahan	Audit Ketaatan	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Dinas Perkim	Ming I Mar 23	Minggu III Mar 2023	2	10	10	10	50	82	5.330.000	6.355.000	11.685.000	1	Irban III	Risiko sedang
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kelembagaan	Audit Ketaatan	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Despora	Ming I Mar 23	Minggu III Mar 2023	2	10	10	10	50	82	5.330.000	6.355.000	11.685.000	1	Irban I	Risiko sedang
9	Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Audit Keuangan	Audit Keuangan dan Aset Puskesmas	Puskesmas Air Bangis	Minggu I Des 23	Minggu III Des 23	2	6	6	6	12	32	4.160.000	4.000.000	8.160.000	1	Irban III	Risiko tinggi
10	Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Audit Keuangan	Audit Keuangan dan Aset Puskesmas	Puskesmas Slipang	Minggu I Des 23	Minggu III Des 23	2	6	6	6	12	32	4.160.000	4.000.000	8.160.000	1	Irban II	Risiko tinggi
11	Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Audit Keuangan	Audit Keuangan dan Aset Puskesmas	Puskesmas Ranah Salitko	Minggu I Des 23	Minggu III Des 23	2	6	6	6	12	32	4.160.000	4.000.000	8.160.000	1	Irban I	Risiko tinggi
12	Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Audit Keuangan	Audit Keuangan dan Aset Puskesmas	Puskesmas Parit	Minggu I Des 23	Minggu III Des 23	2	6	6	6	12	32	4.160.000	4.000.000	8.160.000	1	Irban IV	Risiko tinggi
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Evaluasi	Pengawasan Penerapan SPM	Dinas Kesehatan dan RSUD	Minggu III Jun 2023	Minggu I Jul 2023	2	10	10	10	50	82	4.920.000	1.230.000	6.150.000	1	Irban III	Risiko tinggi
14	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	ADTT	Opname Kas akhir tahun 2023 dan Opname Persediaan Akhir Tahun 2022	Seluruh OPD dan Puskesmas/RS Ujung Gadang	Ming I Jan 23 dan Ming IV Des 23 Jan 24	Ming I Jan 23 dan Ming IV Des 23 Jan 24	15	15	15	15	240	285	18.525.000	17.612.500	36.337.500	9	SEMUA IRBAN	Mandatory

15	Proby Audit	Audit DTT	Pengelolaan Barang dan Jasa terpadu 5 Proyek Strategis Pemda	OPD sesuai dengan proyek strategis	Mgg I Juni 23	Mgg III Juni 23	50	50	100	250	35.000.000	31.250.000	66.250.000	10	SEMUA IRBAN	Mandatory
16	Investigasi/Perhitungan Keuangan Daerah	Audit DTT	PKKN Kerjasama dengan Keajaiban	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	5	5	20	50	7.000.000	6.250.000	13.250.000	2	Irbau Khusus	Mandatory
17	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Audit DTT	10 Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat	Menyesuaikan	Menyesuaikan	30	30	100	190	26.600.000	23.750.000	50.350.000	10	Irbau Khusus	Mandatory
18	Audit Pendapatan	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan pendapatan mulai pemungutan hingga pembayaran insentif/ bagi hasil	Spenda	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	10	10	20	50	3.250.000	3.875.000	7.125.000	1	Irbau Khusus	Mandatory
19	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI SINURUIK	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau II	Risiko tinggi
20	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI PART	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau III	Risiko tinggi
21	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI BATAHAN	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau I	Risiko tinggi
22	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI LUUNG GADING	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau II	Risiko tinggi
23	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI AIA GADANG	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.000.000	900.000	3.900.000	1	Irbau III	Risiko tinggi
24	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI KATAGAN	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.500.000	4.500.000	9.000.000	1	Irbau I	Risiko tinggi
25	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI AIA BANGIH	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau I	Risiko tinggi
26	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI MUARO KAWAJ	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau II	Risiko sedang
27	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI SASAK	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau II	Risiko sedang
28	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI KAJAJI	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau IV	Risiko sedang
29	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.000.000	6.900.000	1	Irbau III	Risiko sedang
30	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI DESA BARU	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau IV	Risiko sedang
31	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI RABI JONGGOR	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbau III	Risiko sedang
32	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI TALLU	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau I	Risiko sedang
33	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI AIA KUNING	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.000.000	900.000	3.900.000	1	Irbau I	Risiko sedang
34	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI KINALI	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau IV	Risiko sedang
35	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI SUNGAU AUA	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.750.000	7.650.000	1	Irbau IV	Risiko sedang
36	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akumulabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI KAPA	Mgg I Agt 23	Mgg III Agst 23	6	6	12	30	3.900.000	3.000.000	6.900.000	1	Irbau IV	Risiko sedang

37	Pengelolaan BUMNAG	ADTT	Akuntabilitas pengelolaan BUMNAG	PEMERINTAH NAGARI LINGKUNG AUA	Mgg I Agt 23	Mgg II Agst 23		6	6	12	30	3.000.000	900.000	3.900.000	1	Irbn II	Risiko sedang
38	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Lembah Melintang	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	11.760.000	12.600.000	24.360.000	1	Irbn I	Mandatory
39	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Gunung Tuleh	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.920.000	12.600.000	23.520.000	1	Irbn I	Mandatory
40	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Sasak Rarah Pasisi	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.080.000	12.600.000	22.680.000	1	Irbn I	Mandatory
41	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Sungai Aur	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.920.000	12.600.000	23.520.000	1	Irbn II	Mandatory
42	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Ranteh Batahan	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	11.760.000	12.600.000	24.360.000	1	Irbn II	Mandatory
43	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Kot Balingka	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	11.760.000	12.600.000	24.360.000	1	Irbn II	Mandatory
44	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Lujak Nan Duo	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.080.000	12.600.000	22.680.000	1	Irbn III	Mandatory
45	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Kinali	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.920.000	12.600.000	23.520.000	1	Irbn III	Mandatory
46	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Palsaman	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	8.400.000	2.520.000	10.920.000	1	Irbn IV	Mandatory
47	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Sungai Beremas	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	11.760.000	12.600.000	24.360.000	1	Irbn IV	Mandatory
48	Pengelolaan dana BOS SD dan SMP	Audit Keuangan	Penelaahaan Keuangan dan Aset SMP/SD Kecamatan Talama	BOS SD SMPT Tahun 2022 (24 Sekolah)	Mgg I Nov 23	Mgg II Nov 23		12	12	48	84	10.920.000	12.600.000	23.520.000	1	Irbn IV	Mandatory
49	Proses evaluasi APB Nagari	Reviu	Reviu atas proses evaluasi rancangan mengena APB Nagari, termasuk konsistens! dengan APB Desa	DPMN	Minggu II Mei 23	Minggu II Mei 23		6	6	12	30	4.200.000	4.500.000	8.700.000	1	Irbn III	Mandatory
50	Penyusunan RKPD Tahun 2024	Reviu	Penyujian atas kesesuaian rancangan akhir dengan perundang-undangan	Bappeda	Mgg I Apr 23	Mgg II Apr 23		10	10	20	50	-	1.500.000	1.500.000	1	Irbn III	Mandatory

51	Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023	Revisi	Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir dengan perundang-undangan	Bappeda	Mg III Sept 23	Mg III Sept 23		8	8	16	40		1.200.000	1.200.000	1	Irbn III	Mandatory
52	Penyusunan Renja SKPD Tahun 2024	Revisi	Pengujian kesesuaian Renja SKPD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024	Seluruh OPD	Mg I Jun 23	Mg III Jun 23		5	5	62	77		2.310.000	2.310.000	31	Irbn III	Mandatory
53	Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024	Revisi	Pengujian KUA-PPAS Pemda Tahun 2023 dengan RKPD	BKAD	Mg I Agst 23	Mg I Agst 23		5	5	20	35		1.050.000	1.050.000	1	Irbn III	Mandatory
54	Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024	Revisi	Pengujian RKA-SKPD Tahun 2024 dengan KUA-PPAS	BKAD	Mg I Nov 23	Mg I Nov 23		25	25	155	230		6.900.000	6.900.000	31	SEMUA IRBAN	Mandatory
55	Penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2023	Revisi	Pengujian RKA-SKPD Perubahan Tahun 2023	BKAD	Mg I Sept 23	Mg III Sept 23		25	25	155	230		6.900.000	6.900.000	31	SEMUA IRBAN	Mandatory
56	Penyusunan UKPD Tahun 2022	Revisi	Revisi UKPD Pemda Tahun 2022	LKPD	Mg II Feb 23	Mg IV Feb 23		10	10	50	80		2.400.000	2.400.000	1	Irbn Khusus	Mandatory
57	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Pendidikan	Revisi	PAUD, SD, SMP, PKBM Tahap I, II dan III	Dinas Pendidikan/ Dinas Perpustakaan	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		12	12	12	48		1.440.000	1.440.000	3	Irbn II	Mandatory
58	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Kesehatan	Revisi	AKI, AKB, STUNTING, PENGENDALIAN PENYAKIT, KEFARMASIAN Tahap I, II dan III	Dinas Kesehatan	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		12	12	12	48		1.440.000	1.440.000	3	Irbn II	Mandatory
59	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Ja	Revisi	KB Tahap I, II dan III	DPPKBP3A	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		3	3	6	15		450.000	450.000	3	Irbn II	Mandatory
60	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Air Minum	Revisi	Bidang Jalan Tahap I, II dan III	Dinas PUJRR	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		3	3	6	15		450.000	450.000	3	Irbn II	Mandatory
61	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Perumahan	Revisi	Bidan Air Minum Tahap I, II dan III	Dinas PUJRR	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		3	3	6	15		450.000	450.000	3	Irbn II	Mandatory
62	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Perumahan	Revisi	Bidang Perumahan Tahap III	Dinas Perkim	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		1	1	2	5		150.000	150.000	3	Irbn II	Mandatory
63	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Pertanian	Revisi	Bidang Perikanan Tahap III	Dinas Perikanan	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		1	1	2	5		150.000	150.000	3	Irbn II	Mandatory
63	Penyusunan Laporan DAK Fisik Bidang Pertanian	Revisi	Bidang Pertanian Tahap III	Dinas Pertanian	Sesuai jadwal penggalan	Sesuai jadwal penggalan		1	1	2	5		150.000	150.000	3	Irbn II	Mandatory

64	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Reviu	Membentik keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SKPD tidak ada modifikasi yang material	Dinas Pendidikan	Ming I Feb 2023	Ming III Feb 2023						3	3	3	3	3			360.000	360.000	3	Irbn I	Mandatory
65	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Reviu	Membentik keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SKPD tidak ada modifikasi yang material	RSUD	Ming I Feb 2023	Ming III Feb 2023						3	3	3	3	3			360.000	360.000	3	Irbn II	Mandatory
66	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Reviu	Membentik keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SKPD tidak ada modifikasi yang material	Dinas Kesehatan	Ming I Feb 2023	Ming III Feb 2023						3	3	3	3	3			360.000	360.000	3	Irbn III	Mandatory
67	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Reviu	Membentik keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SKPD tidak ada modifikasi yang material	Dinas PUPR	Ming I Feb 2023	Ming III Feb 2023						3	3	3	3	3			360.000	360.000	3	Irbn IV	Mandatory
68	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Reviu	Membentik keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SKPD tidak ada modifikasi yang material	Sappeda, BKPSDM dan Kearsipan	Ming I Feb 2023	Ming III Feb 2023						6	6	6	6	6			720.000	720.000	3	Irbn Khusus	Mandatory
69	Capaian MCP KPK (BKPSDM)	Reviu	Reviu Mutasi, ndasi dan promosi ASN	BKPSDM	Ming III Nov 23	Ming I Des 23						5	5	5	5	5			750.000	750.000	1	Irbn III	Mandatory
70	Capaian MCP KPK (BKAD)	Reviu	Reviu RBMD	BKAD	Ming III Jun 23	Ming I Jul 23						5	5	5	5	5			750.000	750.000	1	Irbn III	Mandatory
71	MCP KPK PTSP	Reviu	Reviu Tata Kelola Penzinan	DPMP/PTSP	Ming III Nov 23	Ming I Des 23						5	5	5	5	5			750.000	750.000	1	Irbn I	Mandatory
72	MCP KPK UKPBJ	Reviu	Reviu Tata Kelola PBJ	UKPBJ	Ming III Nov 23	Ming I Des 23						5	5	5	5	5			750.000	750.000	1	Irbn I	Mandatory
73	Penyusunan HPS	Reviu	Reviu HPS untuk Proyek Strategis Pemda	10 HPS Proyek Strategis Pemda	Ming III Mei 23	Ming I Jun 23						10	10	10	10	10			2.400.000	2.400.000	10	SEMUA IRBAN	Mandatory
74	Penyusunan HSPK Pemda 2024	Reviu	Reviu Harga Satuan Pekerjaan konstruksi sesuai target MCP KPK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ming III Mei 23	Ming I Jun 23						2	2	2	2	2			480.000	480.000	1	Irbn IV	Mandatory
75	Penyusunan SSH Pemda 2024	Reviu	Reviu Standar Satuan Harga sesuai target MCP KPK	BKAD	Ming III Mei 23	Ming I Jun 23						2	2	2	2	2			480.000	480.000	1	Irbn III	Mandatory
76	Penyusunan ASB Komuksi dan Non Konstruksi	Reviu	Reviu ASB sesuai target MCP KPK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ming III Mei 23	Ming I Jun 23						1	1	1	1	1			390.000	390.000	1	Irbn IV	Mandatory
77	Penyusunan LPPD	Reviu	Reviu LPPD Pemda 2021	TAPEM	Ming III Mei 23	Ming I Jun 23						5	5	5	5	5			1.050.000	1.050.000	1	Irbn IV	Mandatory
78	Penyelenggaraan PBJ dan Penyerapan Anggaran PBJ	Reviu	Reviu Pelaksanaan Penyerapan Anggaran PBJ Pemda 2022	UKPBJ, BKAD	Setiap triwulan	Setiap triwulan						0	0	0	0	0			-	-	4	Irbn II	Mandatory
79	Perhitungan Sisa DAK Non Fisik Tahun 2022	Reviu	Membentik keyakinan terbatas terhadap jumlah Sisa DAK Non Fisik	BKAD	Ming III Jun 23	Ming I Feb 23						5	5	5	5	5			1.350.000	1.350.000	1	Irbn I	Mandatory
80	Perhitungan Utang Bebanja Pemda 2022	Reviu	Membentik keyakinan terbatas terhadap jumlah utang daerah	BKAD	Ming III Jun 23	Ming I Feb 23						15	15	15	15	15		4.480.000	5.010.000	9.490.000	1	Irbn II	Mandatory

81	Program Pengarusutamaan Gender/PPRG	Reviu	Meyakini perencanaan dan penganggaran sudah telah memperhatikan gender	Seluruh OPD	Mgg IV Mar 23	Mgg I Mei 23						5	5	5	10	25		750.000	750.000	1	ANEV	Mandatory
82	P3DN	Reviu	Meyakini perencanaan, penganggaran dan belanja daerah telah memaklakan produk dalam negeri	Seluruh OPD	Mgg IV Mar 23	Mgg I Mei 23						5	5	5	10	25		750.000	750.000	1	Iban IV	Mandatory
83	Pengendalian Inflasi Daerah	Monitoring	Monitoring harga kebutuhan pokok	DKUKM	Selap hari	Selap hari						0	0	0	0	0		0	0	1	Iban I	Mandatory
84	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemenuhan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Temuan Pemenuhan yang berfuit-laut penyelesaiannya (Termasuk tindaklanjut menyeluruh dan teruk terhadap kasus RSUD Ujung Gading)	Tindak Lanjut Hasil pemenuhan BPK, BPKP, dan Inspektorat														88.375.000			SUBAG ANEV/ Sekretariat	Mandatory dan Permintaan Stake Holder
85	Money Saber Pungjl	MONEY										0	0	0	0	0						
86	Program Uggulan Visi Misi Kepala Daerah	Evaluasi	Evaluasi Akuesi Anggaran Untuk Mendukung Program Uggulan Pemerintahan Daerah dan Pencapalannya	OPD Terkait Visi Misi Kepala Daerah	Ming I Mar 23	Ming I Mar 23	4	5	10	40	64	5	5	5	10	40	1.920.000	1.920.000	2	Iban III	Mandatory	
87	Program Penanggulangan Bencana	Evaluasi	Pengawasan Terhadap NSPK	BPBD	Ming I Mar 23	Ming I Mar 23	4	5	5	10	29	5	5	5	10	29	1.885.000	2.247.500	2	Iban IV	Mandatory	
88	Program Pengelolaan Pendidikan	Evaluasi	Pengawasan Penerapan SPM		Ming I Mar 23	Ming I Mar 23	4	5	5	10	30	5	5	5	10	30	3.510.000	4.185.000	1	Iban I dan Iban III	Mandatory	
89	Program Pengelolaan Pendidikan	Evaluasi	Evaluasi Infrastruktur pendidikan pasca Gempa	Selecamatan Talamau	Ming I Mar 23	Ming I Mar 23	4	5	5	10	20	5	5	5	10	20	3.510.000	4.185.000	1	Iban I	Mandatory	
90	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Evaluasi	Evaluasi data kemiskinan	Dinas Sosial	Mgg III Mar 23	Mgg I Apr 23	2	10	10	50	82	10	10	10	50	82	5.330.000	6.355.000	1	Iban III	Risiko Tinggi	
91	Penempatan Pejabat	Evaluasi	Evaluasi kesesuaian kapabilitas Pejabat dengan Jabatannya	BKPSDM	Mgg III Nov 23	Mgg I Des 23	2	10	10	50	82	10	10	10	50	82	5.330.000	6.355.000	1	Iban III	Permintaan Stake Holder	
92	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Evaluasi SAKIP OPD 2022	Bagian Organisasi	Mgg III Feb 23	Mgg I Mar 23		16	16	31	79	16	16	16	31	79	5.720.000	8.090.000	42	Iban III	Mandatory	
93	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas	Evaluasi	Survey Penilaian Integritas	Menyusulkan dengan pemantauan KPK				5	5	20	35	5	5	5	20	35	1.050.000	1.050.000	1	Iban Khusus	Mandatory	
94	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Pengumpulan bahan, Rekapulasi dan Evaluasi PMPRB	Bagian Organisasi Selda dan OPD	Mgg III Mei 23	Mgg I Jun 23		5	5	20	35	5	5	5	20	35	1.050.000	1.050.000	1	Iban III	Mandatory	
95	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi	Evaluasi benturan kepentingan regulasi manajemen ASN	BKPSDM	Mgg III Nov 23	Mgg I Des 23		5	5	10	25	5	5	5	10	25	750.000	750.000	1	Iban III	Mandatory	

96	Maturitas SPID Terintegrasi	Evaluasi	Pemenuhan persyaratan dokumen SPID	Laporan SPID Pemda	Mgg III Jun 23	Mgg I, Jul 23	0	0	0	0	0	0	0	1	Irbn II	Mandatory		
97	PK APID	Evaluasi	Pemenuhan Levelling APID Pemda	Levelling APID	Mgg IV Jan 23	Mgg I, Jul 23	0	0	0	0	0	0	1	Irbn Khusus	Mandatory			
98	Evaluasi data penerima program UHC	Evaluasi	Menyakit validasi penerima program UHC Per Trivulan	Dinas Kesehatan/ Nagari	Trw I, II, III dan IV	Trw I, II, III dan IV	20	20	20	40	100	6.500.000	7.750.000	14.250.000	Irbn III	Peminaan Stake Holder		
99	Verifikasi LHKPN	Verifikasi	LHKPN	LHKPN			0	0	0	0	0				SUBAG ANEV	Mandatory		
100	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengegiatan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi	Pelaporan Pemenuhan Capaian Target MCP KPK 2023	Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Selap bulan	Selap bulan	0	0	0	0	0				SUBAG ANEV	Mandatory		
101	Evaluasi Pencapaian MCP KPK	Evaluasi	Evaluasi Capaian Target MCP KPK 2023 Pertrivulan	SKPD Terkait	Trivulan I, II, III	Trivulan I, II, III	20	20	20	40	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	SUBAG ANEV	Peminaan Stake Holder		
102	Verifikasi LHKPN / LHKASN	Verifikasi	Verifikasi pelaporan LHKPN/LHKASN Pemda Pasaman Barat	LHKPN / LHKASN	Mar-23	Mar-23	0	0	0	0	0				EVALAB	Mandatory		
103	Pengawasan BUMD	Audit kepatuhan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan PDAM	PDAM	Minggu I, Jul 23	Minggu III Jul 23	10	10	10	20	50	7.000.000	6.250.000	13.250.000	Irbn Khusus	Peminaan Stake Holder		
104	Pendampingan/Asistensi/Konsultasi	Pendampingan	Pendampingan/Asistensi/Konsultasi terhadap OPD yang memerlukan	sesuai Wilayah	Sesuai perminaa n	Sesuai perminaa n	20	20	20	40	100	6.500.000	7.750.000	14.250.000	Irbn I, II, III dan IV	Mandatory		
105	Pendampingan Nagari	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan APB Nagari Tahun 2023	DPMN dan Nagari	Feb 23- Apr 23	Feb 23- Apr 23	0	0	0	0	0				Irbn I, II, III dan IV	Mandatory		
106	Fasilitasi MR	Fasilitasi	Fasilitasi MR OPD Se Kabupaten Pasaman Barat	Seluruh OPD	Feb 23- Apr 23	Feb 23- Apr 23	0	0	0	0	0				Irbn I, II, III dan IV	Mandatory		
107	Pendamping								26	26		1.690.000	2.115.000	3.805.000	IRBAN II	Mandatory		
108	Sosialisasi Anti Korupsi	Pengawasan Lainnya			Jun 23										Irbn Khusus	Mandatory		
109	Telaah Sejawat antar APID	Pengawasan Lainnya			Apr-23										Irbn Khusus	Mandatory		
110	Telaah Sejawat Antar Irbn	Pengawasan Lainnya			Apr-23										SEMUA IRBAN	Mandatory		
111	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Penujangan Pengawasan	Pendidikan Profesional bagi APID	Mengikuti Diklat dari BPKP Kemendagri di jadwal	Sesuai jadwal										SEMUA IRBAN	Mandatory/ Anggaran dissualkan		
Jumlah													424.280.000	490.835.000	1.004.490.000	332		

Pada tanggal Februari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI